



TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN

Diamah Fitriyyah^{1*}, Beta Nabilla²

^{1 2} UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

* Corresponding: diamah.fitriyyah@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran di kabupaten/kota provinsi Banten, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS provinsi Banten bahwa pada tahun 2018 provinsi Banten menduduki angka pengangguran tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 8,52% bahkan angka ini lebih besar dari rata-rata TPT nasional sebesar 5,34% dengan jumlah pengangguran terbanyak diduduki oleh pengangguran lulusan SMA pada wanita sebesar 15,7% dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 11,1% serta lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMP kebawah yang hanya sebesar 5,1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di Provinsi Banten tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan yaitu data panel tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran pada perempuan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi berupa buku, jurnal dan laporan-laporan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, uji statistik diantaranya uji-t dua sisi, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi dengan bantuan software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018, hal ini diketahui karena nilai $(6.739 > 2.042)$ dan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten tahun 2014-2018.

Kata kunci: Tingkat Pengangguran Perempuan; Tingkat Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga kesektor lain tak terkecuali pada masalah ketenagakerjaan. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat, selalu dikatakan dengan tujuan menurunkan angka pengangguran (Naf'an, 2014: 136).

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Banten menempati peringkat tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni sebesar 8,52 persen, bahkan angka ini lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34 persen. Hal ini disebabkan karena keberadaan 14 ribu industri di Banten menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di ujung Pulau Jawa ini. Bukan hanya itu, persoalan lain karena adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukan masyarakat sebagai pegawai disebuah perusahaan. Terutama di kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan, ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena melalui pendidikan, manusia dapat terus menerus mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan mengembangkan diri inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik. Oleh karena itu, pemerintah wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk bersekolah, terlepas dari apapun latar belakang status ekonomi dan sosial mereka, sayangnya pemenuhan hak atas pendidikan ini belum secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih-lebih, ada pula kebijakan liberalisasi dunia pendidikan yang berujung kepada mahalnya biaya pendidikan. Akibatnya, sebagian warga negara, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, tidak dapat menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Belum terpenuhinya hak atas pendidikan ini, tanpa disadari justru memperkuat budaya patrilineal yang telah lama ada di tengah masyarakat. Budaya patrilineal adalah budaya yang memunculkan stereotip gender bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan menjadi keluarga orang lain atau bertugas di dapur juga (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2018: 27).

Bukan hanya dari segi pendidikan saja melainkan dari segi dinamika ketenagakerjaan pun perempuan kerap mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, Padahal

terdapat larangan atas segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk diskriminasi gender, tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di sisi lain yang seharusnya dipertimbangkan dalam suatu hubungan kerja adalah keterampilan dan dedikasi, bukan jenis kelamin atau bentuk fisik pekerjaanya, hanya saja dunia kerja ternyata mampu menciptakan hukum kebiasaan diskriminatif yang bahkan lebih kuat dan mengikat daripada aturan baku atau undang-undang tertulis.

Namun demikian, Betapapun juga, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan sepertinya mulai berkurang. Kondisi ini setidaknya berlaku untuk wanita yang sudah memiliki keahlian (SMA/SMK, Diploma I/II/III dan S1). Selain itu, rendahnya selisih angka TPT perempuan dengan laki-laki lulusan universitas, juga dapat menjadi penanda bagi berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja, tingkat pengangguran di kalangan wanita lulusan SMA Umum, memang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2018: 31-32). Sebagaimana yang terlihat pada tabel gambar dibawah ini:

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Banten Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Agustus 2018 (Persen).



Sumber: BPS Provinsi Banten (data diolah)

Berdasarkan data pengangguran terbuka khususnya pada perempuan berdasarkan kabupaten/kota dan pendidikan tinggi yang ditamatkan di provinsi Banten, angka pengangguran didominasi oleh pengangguran pada perempuan lulusan SMA/SLTA, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Banten Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Di Tamatkan Pada Perempuan (2014-2018).

Tahun	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan					Jumlah/ Total
	Tidak Punya Ijazah SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma/ Universitas	
2018	6.329	13.149	35.060	90.644	15.214	160.396
2017	8.045	19.518	33.983	86.427	16.313	164.286
2016	-	-	-	-	-	-
2015	4.497	26.913	44.082	82.507	15.867	173.866
2014	6.306	22.726	44.773	77.329	12.824	163.958

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah).

Jumlah pengangguran pada perempuan didominasi oleh lulusan SLTA dibandingkan dengan lulusan SLTP dan SD. Hal ini menjadi sumber permasalahan yang harus dipecahkan, karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang ditamatkan semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki, karena pendidikan disiapkan untuk investasi masa depan, sehingga diharapkan apabila seseorang mengenyam pendidikan ia dapat menambah dan mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya sehingga ia akan terserap dalam dunia kerja dan secara otomatis akan menurunkan tingkat pengangguran itu sendiri terutama pada perempuan.

II. LITERATUR REVIEW

Definisi Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan (Hasbullah,1999).

1. Ki Hajar Dewantara;

Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak- anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

2. UU Nomor 2 Tahun 1989;

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang (Hasbullah,1999).

Tingkat atau Jenjang Pendidikan

Tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
3. Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK dan Paket C;
4. Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3 (Badan Pusat Statistik, 2013: 21).

Tujuan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan. Semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan semakin banyak pula yang terserap menjadi tenaga kerja dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan.

Definisi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2019). Pujoalwanto, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang termasuk penduduk usia kerja atau produktif yang berusia 15-64 tahun baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan maupun sedang mempersiapkan usaha baru (Pujoalwanto, 2014).

Untuk mengetahui suatu perkembangan angkatan kerja suatu negara dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi jumlah angkatan kerja dari jumlah tenaga kerja, untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100 \%$$

Masalah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang banyak tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan. Apabila pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, maka akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Dalam dunia ketenagakerjaan, Indonesia terutama provinsi Banten memiliki banyak masalah yang harus ditangani dan diatasi oleh pemerintah, seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan kerja, penyebaran tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja (Khotimah, 2018).

Definisi Pengangguran dan Jenis-Jenis Pengangguran

Merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku "*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*", ILO 1992. Pengangguran atau pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistic, 2016).

Pengangguran secara umum adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja (BAPPENAS, 2007). Berdasarkan klasifikasi pengangguran, O. Edwards (1974) membaginya menjadi lima bagian yaitu: (Arsyad, 2015).

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*). Termasuk ke dalam jenis ini adalah mereka yang ingin bekerja, berusaha mendapat dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.
2. Setengah Pengangguran (*Under Unemployment*). Mereka yang bekerja dengan jam kerja yang terbatas dan tidak melakukan produksi.
3. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*). Pengangguran ini terjadi karena terlalu banyaknya pegawai pada satu unit kerja padahal dengan mengurangi pegawai sampai jumlah tertentu tetap tidak akan mengurangi jumlah produksi.
4. Tenaga Kerja yang Lemah (*Impaired*). Yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. Tenaga Kerja yang Tidak Produktif. Yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena sumberdaya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik. (Arsyad, 2015).

Sedangkan jenis-jenis pengangguran dapat dibagikan kepada tujuh kategori, diantaranya yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*). Pengangguran Friksional disebut juga pengangguran sukarela, yaitu lahir karena tenaga kerja meninggalkan pekerjaan yang lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. (Ibrahim, 2017).
2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*). Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.
3. Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*). Atau disebut juga pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian.
4. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*). Pengangguran ini berkaitan

erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Misalnya, di luar musim tanam dan panen, petani umumnya menganggur, sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. (Rahardja dan Manurung, 2008).

5. Pengangguran Teknologi. Pengangguran ini terjadi karena Perubahan orientasi yang semula padat karya menjadi padat modal dengan mengandalkan kemajuan teknologi.
6. Pengangguran Politis. Pengangguran ini terjadi karena terbitnya regulasi baru yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Misalnya kenaikan upah minimum oleh pemerintah daerah karena desakan organisasi buruh memaksa para pengusaha melakukan rasionalisasi dengan jalan mem-PHK karyawannya.
7. Pengangguran Deflatoir. Pengangguran jenis ini terjadi karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. (Ibrahim, 2017).

Sementara itu, faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh karena pekerja mencari Pekerjaan yang lebih baik, penggunaan peralatan yang lebih modern seperti robot yang bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang diperlukan industri. (Sukwiaty, 2009: 127-128).

Dampak Negative dan Kebijakan atau Solusi Mengatasi Pengangguran

Dengan adanya pengangguran dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perekonomian seperti melemahnya permintaan dan penawaran agregat, maupun stabilitas sosial politik. Oleh karena itu perlu diambil beberapa kebijakan atau solusi dalam mengatasinya.

Kebijakan dalam hal mengatasi pengangguran harus disesuaikan dengan jenis penganggurannya. Kebijakan mengatasi pengangguran Struktural; a. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, b. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.

Kebijakan Mengatasi Pengangguran Friksional; a. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya, b. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA dan lain-lain.

Kebijakan Mengatasi Pengangguran Musiman yaitu; a, Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, b. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara Mengatasi Pengangguran Siklis yaitu dengan cara mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan Perumbuhan ekonomi, meningkatkan fleksibilitas dan investasi tenaga kerja dan meningkatkan pekerjaan secara langsung (Sukwiaty, 2009).

III. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan selesai. Tahun pengamatan dari tahun 2014- 2018. Penelitian ini juga dilakukan di Provinsi Banten, dengan lembaga terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang Provinsi Banten, Telp: (0253) 267027, Fax: (0253) 267026, *E-mail*: banten@bps.go.id, *website*: <http://banten.bps.go.id>. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya terdiri atas angka-angka. Populasi dalam penelitian ini adalah data pendidikan dan pengangguran di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sampel dalam penelitian ini yaitu data mengenai Pendidikan dan Pengangguran di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2014-2018. dengan menggunakan teknik *Sampling Jenuh*. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, diperoleh jumlah sampel (n) dari data panel Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebanyak 8 Kabupaten/Kota dengan jenjang waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 (2016 tidak dicantumkan dikarenakan terdapat kekurangan yakni data untuk angkatan kerja maupun pengangguran menurut Kabupaten/ Kota dan pendidikan tinggi yang ditamatkan, Badan Pusat Statistik tidak menyediakan). Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $8 \times 4 = 32$ sampel atau obek penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Output Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.679	6.201		2.528	.017
X	1.400	.208	.776	6.739	.000

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22.

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 15,679 + 1,400 X + e$$

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linear sederhana maka dapat diinterpretasinya sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 15,679 menyatakan bahwa, ketika Tingkat Pendidikan sama dengan 0 maka Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten sebesar 15,679 persen.
- Koefisien regresi variabel X sebesar 1,400 menyatakan bahwa kenaikan 1 persen Tingkat Pendidikan akan menyebabkan kenaikan pada Provinsi Banten (Y) berpengaruh positif sebesar 1,400 persen.

Pengujian Statistik

a. Uji Hipotesis (Uji-t).

**Tabel 3. Uji Hipotesis (Uji-t).
Coefficientsa**

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		

Diamah Fitriyah dan Beta Nabilla: Tingkat Pendidikan dan Tingkat...

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	15.679	6.201		2.528	.017
X	1.400	.208	.776	6.739	.000

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas, diketahui t_{hitung} sebesar 6,739 sedangkan pada nilai t_{tabel} dengan menggunakan uji dua arah dengan signifikansi 5% $df (n-k-1) - (40-1-1) - 38$, maka didapat nilai t_{tabel} sebesar 2,042. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,739 > 2,042$) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten.

b. Analisis Koefisien Korelasi.

Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS 22 sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.776 ^a	.602	.589	13.39051	1.544

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variabel: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,776 yang terletak pada interval 0,60 – 0,799 yang berarti tingkat hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten adalah Kuat.

c. Koefisien Determinasi (R²).

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.776 ^a	.602	.589	13.39051	1.544

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variabel: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,602 = 60,2 %. Hal ini berarti bahwa variabel Tingkat Pendidikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan sebesar 60,2 % dan sisanya sebesar 39,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor upah, partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan faktor-faktor lainnya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018, hal ini dapat dilihat dari t hitung nilai ($6,739 > 2,042$) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).
- 2) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,776 yang berarti tingkat hubungan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di Provinsi Banten adalah kuat. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,602 = 60,2 %, hal ini berarti bahwa variabel Tingkat Pendidikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan sebesar 60,2% dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sebagai saran yang dapat diberikan secara umum untuk menekan tingkat pengangguran perempuan khususnya di Provinsi Banten tersebut, diperlukan upaya peningkatan taraf pendidikan bagi perempuan itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja sehingga tenaga kerja perempuan bisa terserap di dunia kerja, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki namun dengan tetap memperhatikan karakteristik dari keduanya, oleh karena itu dengan adanya peraturan pemerintah dalam hal ini yang berkaitan dengan ketenagakerjaan perempuan khususnya, diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran perempuan itu sendiri yang selama ini masih terdapat kesenjangan gender. Hendaknya pemerintah lebih mengembangkan sektor usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menambah investasi pada industri padat karya sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran yang ada terkhusus pada perempuan itu sendiri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Mei 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2013.
- Badan Pusat Statistic, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2016*, Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2018*, Banten: CV. Dharmaputra, 2018.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Banten Dalam Angka 2019*, Banten: BPS Provinsi Banten, 2019.
- BAPPENAS, *Rencana Penanggulangan Masalah Pengangguran Terdidik*, Jakarta: PT. Wacana Bijak Bestari, 2007.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ibrahim, Zaini, *Pengantar Eknomi Makro*, Banten: Kopsyah Baraka, 2017.

Khotimah, Khusnul, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, Cetakan Ke 1*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Sukwiaty, dkk, *Ekonomi SMA Kelas X*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia Printing, 2009.

Syekh, Sayid, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial*, Jakarta: Baung Persada, 201